

Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Utara

Norman Gideon¹, Petrus Roreng², Fransiskus Randa³, Petrus ma'na⁴

1. Magister Management Program, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. E-mail: kulapenorman22@gmail.com
2. Magister Management Program, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. E-mail: petruspeleng@ukipaulus.ac.id
3. Magister Management Program, Universitas Kristen Indonesia Paulus Indonesia, E-mail: landa_fransiskus@ukipaulus.ac.id
4. Magister Management Program, Universitas Kristen Indonesia Paulus Indonesia, E-mail: petrus@ukipaulus.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik dan pengetahuan dewan terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Utara. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda dengan bantuan *software Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 23. Analisis ini didasarkan pada data dari 33 responden yang telah melengkapi seluruh pernyataan dalam kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik dan pengetahuan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan anggaran secara parsial dan simultan. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas akan tercapai jika pengawasan dewan tentang anggaran secara efektif dan pengetahuan dewan sangat diperlukan dimana pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman sehingga aktivitas dan kinerjanya dapat diterima dimasyarakat.

Kata Kunci : akuntabilitas publik, pengetahuan dewan, pengawasan anggaran

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of public accountability and board knowledge on oversight of regional revenue and expenditure budgets. The data used in this study are primary data. Data collection was carried out by distributing questionnaires to members of the North Halmahera Regional Representative Council. The analytical method used to test the hypothesis is multiple linear regression with the help of Statistical Package for Social Science (SPSS) version 23. This analysis is based on data from 33 respondents who have completed all statements in the questionnaire. The results showed that the variable of public accountability and board knowledge had a

positive and significant effect on budget oversight partially and simultaneously. This shows that accountability will be achieved if effective oversight of the board on the budget and knowledge of the board is needed where knowledge is closely related to education and experience so that its activities and performance can be accepted in the community.

Keywords: public accountability, board knowledge, budget oversight

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 Tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggung jawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan *power relation* antara eksekutif, legislative dan rakyat itu sendiri (Sopanah,2004).

Realitasnya, peranan dewan ketika menyusun anggaran dimasa orde baru sangat kecil bahkan tidak ada, apalagi peran masyarakat. Dewan terkesan hanya memberikan pengesahan atas RAPBD yang diajukan eksekutif dan praktis tidak diberi wewenang untuk mengubahnya (fungsi legislasi). Dengan adanya UU No. 22/1999 sebagai dampak positif dari reformasi, telah terjadi perubahan signifikan mengenai hubungan legislative dan eksekutif di daerah, karena kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki power. Dewan tidak hanya diberi kekuasaan untuk bersama-sama dengan eksekutif menyusun anggaran (fungsi budgeting), eksekutif juga bertanggung jawab terhadap DPRD (fungsi controlling). Disamping itu, diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah juga diikuti dengan pelimpahan wewenang dari pusat dan daerah yang diikuti pula pelimpahan dana. Pelimpahan dana ini Dibarengi dengan dilaksanakannya reformasi penganggaran dan reformasi sistem akuntansi keuangan daerah (Halim, 2003). Reformasi penganggaran yang terjadi adalah munculnya paradigma baru dalam penyusunan anggaran yang mengedepankan prinsip akuntabilitas publik, Partisipasi masyarakat, dan transparansi anggaran. Disamping itu, anggaran harus dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented). Prinsip efisien dan efektif (*value for money*), keadilan dan kesejahteraan dan sesuai engan disiplin anggaran (Mardiasmo, 2003).

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. UU No. 32 dan 33 tahun 2004 merupakan tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia. UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD

Negara RI tahun 1945. Hal tersebut sangat berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah seperti APBD (Ritonga, 2009) dan hubungan legislatif dan eksekutif di daerah. Diharapkan DPRD melalui dewan akan lebih aktif menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati atau Walikota). Otonomi yang luas, nyata, bertanggungjawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan pada pola pengawasan terkait dengan diberinya keleluasaan kepada pemda untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132, menyatakan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi umum yaitu:

- 1) Legislasi: Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.
- 2) Anggaran: Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- 3) Pengawasan: Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Dalam hal ini fungsi DPRD kabupaten halmahera utara adalah :

1. Legislasi : a) Membuat Peraturan daerah (perda), b) Membuat program legislasi daerah, c) Melakukan sinkronisasi rancangan perda
2. Anggaran : Melakukan rapat untuk membahas APBD untuk persetujuan bersama.
3. Pengawasan : (1) dalam fungsi pengawasan anggota DPRD Kabupaten Halmahera utara dapat memainkan peran *public service watch* bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintahan daerah kabupaten halmahera utara, dan
(2) terhadap kebijakan regulasi apakah sesuai perUU disepakati atau tidak.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal ini adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan dewan, salah satunya adalah pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawas keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. Sementara Pramono (2002) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menunjang fungsi pengawasan adalah adanya reformasi dan legitimasi wakil rakyat sedangkan faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh (sopannah dan Mardiasmo, 2003) dan hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Disamping itu, interaksi pengetahuan anggaran dengan

partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap pengawasa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
2. Apakah pengetahuan dewan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran pendapatan daerah (APBD).
3. Apakah Akuntabilitas Publik dan Pengetahuan Dewan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan bertujuan:

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei atas persepsi responden dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini adalah riset pengujian hipotesis (*hypothesis testing*). Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan hubungan antara variabel dengan pengujian hipotesis. Pada penelitian ini terfokus pada pengaruh akuntabilitas publik dan pengetahuan dewan sebagai variabel independen terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai variabel dependennya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis dengan membagikan kuesioner kepada semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara.

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data *numerical* atau angka yang diperoleh dengan metode statistik serta dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti.

Jenis Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari jawaban para responden yang terdapat dalam kuesioner yang akan menghasilkan skor tertentu pada setiap jawaban tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan cara untuk memperoleh data primer secara langsung dengan melibatkan pihak responden yang dijadikan sampel dalam penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden adalah dengan memberikan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian Wahyuni (2017), Bintong (2016), dan Puspitasari (2014). Kuesioner yang telah terisi dikembalikan secara langsung kepada peneliti.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yakni variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Adapun variabel bebasnya ini adalah Akuntabilitas dan Pengetahuan dewan sedangkan variabel terikat adalah Pengawasan Anggaran.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penarikan batasan untuk menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. Definisi operasional dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut.

Akuntabilitas (X1)

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya (Penny Kusumastuti 2014:2). Akuntabilitas publik diukur dengan instrumen yang terdiri dari sembilan pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert lima poin yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = tidak ada pendapat/netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

Pengetahuan Dewan (X2)

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi serta mengidentifikasi adanya pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran (Yudoyono 2002). Pengetahuan dewan diukur dengan instrumen yang terdiri dari enam pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert lima poin yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = tidak ada pendapat/netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

Pengawasan Anggaran (Y)

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada saat penyusunan, pengesahan APBD dan pertanggungjawaban APBD (Wahyuningsih;2014). Pengawasan Anggaran diukur dengan instrumen yang terdiri dari delapan pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert lima poin yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = tidak ada pendapat/netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Instrumen penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian adalah beberapa daftar pertanyaan serta kuesioner yang disampaikan dan diberikan kepada masing-masing responden yang menjadi sampel dalam penelitian. Instrumen yang berbentuk kuesioner ini digunakan untuk mengukur pengaruh Akuntabilitas dan Pengetahuan Dewan terhadap Pengawasan Anggaran. Akuntabilitas publik yang merupakan Variabel X1, diukur dengan instrumen yang terdiri dari item sembilan (9) pertanyaan yang diadaptasi dari Arditya (2013). Pengetahuan Dewan yang merupakan variabel X2, diukur dengan instrumen yang terdiri dari enam (6) item pertanyaan yang diadaptasi dari Juliastuti (2013). Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang merupakan variabel Y, diukur dengan instrumen yang terdiri dari delapan (8) item pertanyaan yang diadaptasi dari Arditya (2013). Kuesioner akan diisi atau dijawab oleh Anggota Dewan Kabupaten Almahera Utara. Jenis pernyataan adalah tertutup, responden hanya memberi tanda/tickmark berupa silang (X) atau *checklist* (V) pada pilihan jawaban yang tersedia. Penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 untuk semua variabel.

Analisis Data

Sebelum memasuki tahap analisis data, kuesioner yang telah kembali akan disortir kembali terlebih dahulu. Kuesioner yang diproses lebih lanjut adalah kuesioner yang telah diisi oleh responden yang secara lengkap yang akan diproses ketahap analisis. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS analisis statistik dengan menggunakan program aplikasi SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 23.

Statistik Deskriptif

Sugiyono (2017:147) mengatakan bahwa analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Uji Kualitas Data

Pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki tingkat kebenaran/keabsahan (*validity*) dan tingkat keandalan (*reliability*) yang tinggi.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu kuesioner sebagai suatu instrumen penelitian. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016: 52). Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Nilai r tabel diperoleh dari *degree of freedom* = $n-2$, di mana n adalah jumlah responden (Ghozali, 2016: 53). Apabila nilai korelasinya lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap valid. Jika nilai korelasinya lebih kecil dari nilai r tabel, maka pernyataan dianggap tidak valid dan harus dikeluarkan dari pengujian.

Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel yang diteliti. Pertanyaan dalam kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten (Ghozali, 2016: 47). Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *cronbach alpha* dengan bantuan software SPSS. Koefisien *cronbach's alpha* yang lebih dari nilai r tabel disebut reliabel. Ada juga yang berpendapat reliabel jika *cronbach alpha* > 0,60 (Sunyoto, 2013: 81). Nilai *cronbachs alpha* yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

Uji Asumsi Klasik Uji

Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Sunyoto, 2013:92). Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik. Pengambilan keputusan dengan analisis grafik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normal *probability plot*. Uji normal normal *probability plot* dikatakan berdistribusi normal jika garis data rill mengikuti garis diagonal (Sunyoto, 2013:96). Cara ini dianggap lebih handal dari pada grafik histogram karena cara ini membandingkan data rill dengan data distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk analisis regresi berganda yang terdiri dari minimal dua variabel bebas, di mana akan diukur tingkat asosiasi (keeratn) hubungan atau pengaruh antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dalam menentukan terjadinya multikolinieritas dapat digunakan cara sebagai berikut.

- a. Nilai *tolerance* adalah tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik.
- b. Nilai *varianceinflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Salah satu cara untuk menguji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Dalam Ghozali (2016: 103-104) dikatakan bahwa nilai *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi nilai heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Dasar analisis:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedasitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y maka terjadi homoskedastitas (Ghozali, 2016).

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Akuntabilitas dan pengetahuan dewan, variabel independen terhadap Pengawasan anggaran sebagai variabel dependen digunakan dua bentuk pengujian hipotesis yakni secara parsial dengan uji *t* (untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial terhadap pengawasan anggaran) dan secara simultan dengan uji *F* (untuk melihat pengaruh Akuntabilitas dan pengetahuan dewan secara keseluruhan terhadap pengawasan anggaran), Adapun persamaannya sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan: Y = Pengawas Keuangan daerah (APBD)

α = konstanta

X₁ = Akuntabilitas Publik X₂

= Pengetahuan dewan

β_1, β_2 , = koefisien regresi yang akan dihitung ϵ = faktor pengganggu atau *error term*

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter sama dengan nol, atau: $H_0 : \beta_1 \beta_2 = 0$ Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau $H_a : \beta_1 \beta_2 \neq 0$ artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

Uji signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian ini melibatkan variabel bebas (Akuntabilitas dan pengetahuan dewan) terhadap variabel terikat (pengawasan APBD) dalam menguji ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama. Pengujian secara simultan menggunakan distribusi F, yaitu membandingkan antara F hitung dengan F tabel.

- a. $H_0: \beta_1 \beta_2 = 0$, artinya Akuntabilitas dan pengetahuan dewan tidak signifikan atau tidak berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan APBD.
- b. $H_a: \beta_1 \beta_2 \neq 0$, artinya Akuntabilitas dan pengetahuan dewan berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan APBD.

Koefisien Determinasi Majemuk (R^2)

Koefisien determinasi dinyatakan dengan R^2 , pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi berada antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati 1 memberi arti bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016: 95)

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan mendatangi langsung ke lokasi pengambilan sampel, yaitu di kantor DPRD halmahera utara Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Jalan kawasan pemerintahan No.1b. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan kurang lebih 4 hari, yaitu dari tanggal 4 februari 2019 sampai 8 februari 2019. Kuesioner yang disebarakan berjumlah 35 eksemplar dan dikembalikan adalah 33 eksemplar, atau tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 88,33% dan sisanya 2 kuesioner atau sebanyak 11,67% tidak kembali..

Karakteristik Responden

Karakteristik data dengan skala pengukuran kategorial bertujuan untuk mendeskripsikan frekuensi dan presentase tiap kategori. Sebanyak 33 Anggota Dewan pada Kantor Perwakilan DPRD Provinsi Maluku Utara berhasil dikumpulkan sebagai responden dalam penelitian ini. Demografi responden diklasifikasikan menurut jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir.

Statistik deskriptif menggambarkan tiap variabel dalam penelitian ini. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Pengawasan Anggaran, sedangkan untuk variabel independen terdiri dari Akuntabilitas dan Pengetahuan Dewan, berdasarkan jawaban dari 33 responden maka hasil pengukuran variabel Pengawasan anggaran (Y) diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 35,96 dengan standar deviasi 2,90. Hasil pengukuran variabel Akuntabilitas (X_1) diperoleh skor jawaban responden mempunyai rata-rata 40,54 dengan standar deviasi 3,19. Hasil pengukuran variabel Pengetahuan Dewan (X_2) diperoleh dengan skor jawaban rata-rata 27,45 dengan standar deviasi 1,95.

Hasil Uji Kualitas Data Uji

Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016: 52). Pengujian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total dengan menggunakan *corrected item-total correlation* atau dengan melihat korelasi *product moment pearson* yang kemudian dibandingkan dengan r tabel. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan metode *Pearson Correlation*. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila koefisien korelasi r hitung > r tabel pada taraf signifikansi 5%. Cara menghitung r tabel adalah diperoleh dari *degree of freedom* = $n-2$, n adalah jumlah responden. jumlah responden dalam penelitian ini adalah 33, sehingga nilai df = $33-2=31$, maka nilai r tabel bernilai 0,344. dapat diketahui bahwa semua item pernyataan untuk semua variabel adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan antara r hitung dan r tabel dimana nilai dari r hitung untuk semua item lebih besar dari pada r tabel. Oleh karena itu, maka dapat dilakukan uji lebih lanjut, yaitu uji realibilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Uji Realibilitas Data

Realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel yang diteliti. Pernyataan dalam kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terdapat pernyataan adalah konsisten. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *cronbach alpa*. Koefisien *cronbach alpa* > 0,60 menunjukkan keandalan suatu instrumen (Sunyoto, 2013). variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel karena memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar (>) dari 0,600, sehingga layak dijadikan alat ukur instrumen kuesioner penelitian ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel maka selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang bias. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yakni uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel, baik variabel bebas maupun variabel terkait terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang mempunyai distribusi yang normal atau mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan pendekatan Normal *Probabiliti Plot* (P-Plot). Dalam uji P-Plot dikatakan berdistribusi normal jika garis data rill mengikuti garis diagonal.

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya penyebaran data (titik-titik) di sekitar garis regresi (garis diagonal).

Uji Multikolinieritas

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk analisis regresi berganda yang terdiri dari minimal dua variabel bebas, tingkat asosiasi (keeratan) hubungan atau (r). Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah dalam suatu model regresi linier berganda terdapat korelasi antar variabel. Model regresi linier berganda yang baik adalah yang tidak mengalami multikolinieritas. Salah satu cara untuk menguji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *varianceinflation factor* (VIF). Nilai *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF >10.

, ditemukan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10, begitupun dengan nilai VIF disetiap variabel independen tidak ada yang lebih dari 10 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas, sehingga salah satu syarat uji regresi berganda telah terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama maka terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dikatakan

tidak terjadi heteroskedastisitas jika pada *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka nol) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur.

Hasil Pengujian hipotesis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik regresi linear berganda. Model regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji variabel independen yaitu Akuntabilitas(X1), dan pengetahuan dewan (X2) terhadap variabel dependen yaitu Pengawasan anggaran (Y)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dengan bentuk persamaan regresi linear berganda diperoleh hasil sebagai berikut.

$$Y = 3,350 + 0,913X_1 + 0,084X_2 + e$$

Berdasarkan model regresi dan tabel 4.7 di atas maka hasil regresi linear berganda dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Persamaan linear berganda di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 3,350. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Akuntabilitas dan Pengetahuan Dewan dianggap konstan, maka Pengawasan anggaran akan meningkat sebesar 3,350 satuan.
2. Koefisien regresi pada akuntabilitas publik (X1) memiliki nilai konstanta sebesar 0,913, hal ini berarti apabila variabel akuntabilitas publik bertambah satu satuan maka variabel Pengawasan anggaran akan meningkat sebesar 0,913 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi pada variabel pengetahuan dewan (X2) memiliki nilai konstanta sebesar 0,084 hal ini berarti jika variabel pengetahuan dewan bertambah satu satuan maka variabel Pengawasan anggaran akan meningkat sebesar 0,084 dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji Signifikan Parameter Individual (uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016: 171). Berikut merupakan hasil uji signifikan parameter individual (uji t).

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hasil uji hipotesis, yaitu.

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan anggaran. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} variabel akuntabilitas publik (X1) sebesar 43,378 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2,004 atau $t_{hitung} 43,378 > t_{tabel} 2,004$ dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD diterima.
2. Pengetahuan Dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan anggaran. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} pengetahuan dewan (X2) sebesar 2,435 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2,004 atau $t_{hitung} 2,435 > t_{tabel} 2,004$ dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,021 yang lebih kecil dari 0,05 atau $0,021 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) diterima.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016: 171). Hasil uji ANOVA atau *F test* seperti yang ditampilkan pada tabel di atas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 960,033 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka semua variabel independen yaitu Akuntabilitas dan Pengetahuan Dewan secara simultan berpengaruh terhadap Pengawasan anggaran.

Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi

besarnya adjusted R^2 adalah 0,984. hal ini berarti sebesar 98,4% variabilitas variabel Pengawasan anggaran dapat dijelaskan oleh variabilitas dari kedua variabel independen yaitu akuntabilitas dan Pengetahuan Dewan. Sedangkan sisanya sebesar 1,6% (100% - 98,4%) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Akuntabilitas (X1) terhadap Pengawasan Anggaran (Y)

Hasil uji statistik t antara variabel Akuntabilitas dengan variabel Pengawasan anggaran menunjukkan hasil t hitung sebesar 43,378 dan hasil koefisien regresi sebesar 0,913 yang berarti bahwa arahanya positif terhadap Pengawasan anggaran dan tingkat signifikansinya menunjukkan nilai sebesar 0,000 yang berarti nilai ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau 5% dan koefisien regresi bertanda positif, maka dalam hal ini Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengawasan Anggaran, sehingga hipotesis pertama diterima.

Hasil penelitian ini mendukung Sudiarta, dkk (2014) akuntabilitas publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Akuntabilitas publik dapat mendorong anggota dewan untuk meningkatkan pengawasan keuangan daerah, dan juga dapat memberikan peran kepada masyarakat untuk dapat mengetahui proses dan hasil pengawasan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Pramita dan Andriyani (2010) membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Pengaruh Pengetahuan Dewan (X2) terhadap Pengawasan Anggaran (Y)

Hasil uji statistik t antara variabel Pengetahuan Dewan dengan variabel Pengawasan anggaran menunjukkan hasil t hitung sebesar 2,435 dan hasil koefisien regresi sebesar 0,084 yang berarti bahwa arahanya positif terhadap Pengawasan anggaran dan tingkat signifikansinya menunjukkan nilai sebesar 0,021 yang berarti nilai ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau 5% dan koefisien regresi bertanda positif, maka dalam hal ini Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengawasan Anggaran, sehingga hipotesis Kedua diterima.

Dalam penelitian Pramita dan Andriyani (2010), dan penelitian yang dilakukan oleh Sudiarta, dkk (2014) membuktikan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Pengetahuan Dewan secara simultan terhadap Pengawasan Anggaran.

Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Akuntabilitas dan Pengetahuan Dewan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dan positif dalam Pengawasan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka H_3 dapat diterima.

PENUTUP

Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mendukung semua hipotesis yang diajukan, penjelasan rinciannya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama, bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengawasan Anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas akan tercapai jika pengawasan dewan tentang anggaran secara efektif. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori Stakeholders dijelaskan bahwa stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu pemerintah dan DPRD, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Pemerintah dan DPRD saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab dan akuntabilitas.
2. Hasil penelitian ini juga mendukung hipotesis kedua. Pada penelitian ini variabel Pengetahuan Dewan berpengaruh positif terhadap pengawasan anggaran. Pengetahuan dewan sangat diperlukan dimana Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Sehingga aktivitas dan kinerjanya dapat diterima dimasyarakat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori legitimasi dijelaskan bahwa teori ini berfokus pada interaksi sektor DPRD dan masyarakat dimana legitimasi dianggap penting bagi dewan dikarenakan legitimasi masyarakat menjadi faktor yang sangat strategis bagi perkembangan DPRD kedepannya. Legitimasi menganjurkan DPRD untuk meyakinkan bahwa aktivitasnya dan kinerjanya dapat diterima dimasyarakat karena DPRD harus sesuai dengan harapan masyarakat didalam pengawasan Anggaran. Untuk itu Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Apabila pengetahuan dewan tentang anggaran baik maka diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan dewan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

3. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas dan Pengetahuan dewan secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam Pengawasan Anggaran (APBD).

Keterbatasan Penelitian

Peneliti mengakui bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak keterbatasan yang memungkinkan dapat memberikan gangguan hasil penelitian.

1. Penelitian ini hanya menggunakan instrumen kuesioner sehingga belum bisa menggambarkan secara keseluruhan kondisi yang terjadi pada objek penelitian.
2. Keterbatasan selanjutnya adalah jumlah responden yang kurang banyak.
3. penelitian ini kemungkinan akan berbeda jika responden penelitian ini adalah anggota DPRD dalam lingkup yang luas
4. Keterbatasan selanjutnya adalah penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu Akuntabilitas dan pengetahuan Dewan.

Saran Penelitian

Pada penelitian ini masih membutuhkan beberapa item perbaikan untuk dilakukan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang masih memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang sejenis, sehingga dapat menjadikan penelitian ini lebih paripurna. Adapun beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yakni,

1. sampel responden sebaiknya lebih diperluas untuk mendapatkan keterwakilan yang lebih besar atas populasi penelitian yang diteliti. Perluasan ini dapat berupa penambahan ruang lingkup geografis responden maupun penambahan jumlah responden.
2. Penelitian selanjutnya juga sebaiknya mencoba instrumen lain selain kuesioner agar data yang diperoleh lebih bisa menggambarkan objek penelitian secara keseluruhan.
3. Penambahan beberapa variabel lain yang digunakan dalam mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku disfungsi auditor juga disarankan

DAFTAR PUSTAKA

- Arditya, Elsa. 2013. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di kabupaten ogan ilir. Palembang; Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2003, Bunga Rampai Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Jogjakarta.
- Julianti, Ayu. 2013. Pengaruh Akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (studi empiris pada DPRD Kota di provinsi sumatra barat). Padang; universitas negeri padang.

- Mardiasmo, 2003, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, jogjakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Penny, Kusumastuti, (2014), Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi KeDepan. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelola Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Ritonga, Irwan. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Sopannah, 2004, Menyoal Anggaran Publik, dalam pesangon Gate, Bulletin suara Korban, Malang corruption Watch (MCW), Edisi 1 Maret 2004
- 2004, Membongkar Jaringan Asmara, dalam Menyingkap sisi Gelap Musbangkel Musbangkel Bulletin Suara Korban, Malang Corruption Watch (MCW), Edisi III Mei 2004
- Sudiarta,dkk. 2014. Analisis Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderating. Jurnal Akuntansi, Vol 2, No 1. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama.
- Yudoyono, Bambang, 2002, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, <http://www.bangda.depdaqri.go.id./jurnal/jendela/jendela3.htm>.